

MUTU-4133F 4.0 19/07/2016

Depok, 06 November 2019

Nomor: 2917.31/EXT-MUTU/XI/2019

Perihal: Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja LK KELOMPOK JENEPONTO 5

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk

Nama Perusahaan : KELOMPOK JENEPONTO 5

No. Izin TPT-KO: No. 522.121.404m.XII.2014, Tanggal 30 Desember 2014 (UD Jusni)

No. 522.121.404k.XII.2014, Tanggal 30 Desember 2014 (UD Ismail Utama) No. 522.21.404L.XII.2014, Tanggal 30 Desember 2014 (UD Cahaya Mimbar)

Alamat Kantor : Bontoburungeng, RT 001, RW.002. Desa Camba- Camba, Kecamatan Batang, Kabupaten

Jeneponto

Alamat Lokasi : Bontoburungeng, RT 001, RW.002. Desa Camba- Camba, Kecamatan Batang, Kabupaten

Jeneponto (UD Jusni)

Petang, Desa Arungkeke, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi

Sclatan (UD Ismail Utama & UD Cahaya Mimbar)

Tanggal Kegiatan : 21 – 28 Oktober 2019

Jenis Kegiatan : Assessment VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

Bambang Gunardjitod Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan:

- 1. Direktur PPHH Kemen LHK
- Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan
- 3. Kepala BPHP Wilayah XIII
- 4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan



MUTU-4133F 19/07/2016

PENGUMUMAN PUBLIK PENILAIAN KINERJA VLK



PENGUMUMAN HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT SERTIFIKASI KELOMPOK JENEPONTO 5

Nomor: 2917.31/EXT-MUTU/XI/2019

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

Nama Auditee : KELOMPOK JENEPONTO 5 a

Alamat Kantor : Bontoburungeng, RT 001, RW.002. Desa Camba- Camba, Kecamatan Batang,

Kabupaten Jeneponto

Alamat Lokasi : Bontoburungeng, RT 001, RW.002. Desa Camba- Camba, Kecamatan Batang,

Kabupaten Jeneponto (UD Jusni)

Petang, Desa Arungkeke, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto, Provinsi

Sulawesi Selatan (UD Ismail Utama & UD Cahaya Mimbar)

No. Izin TPT-KO : No. 522.121.404m.XII.2014, Tanggal 30 Desember 2014 (UD Jusni)

No. 522.121.404k.XII.2014, Tanggal 30 Desember 2014 (UD Ismail Utama)

No. 522.21.404L.XII.2014, Tanggal 30 Desember 2014 (UD Cahaya Mimbar)

Produk & Luas : Kavu Olahan = 250 M³ / Luas TPT : 12 x 21 M² (UD Jusni)

Kayu Olahan = 500 M³ / Luas TPT: 84 M² (UD Ismail Utama)

Kayu Olahan = 500 M3 / Luas TPT: 230 M2 (UD Cahaya Mimbar)

Tanggal Pelaksanaan : 21 - 28 Oktober 2019 f.

Jenis Kegiatan : Assessment VLK Industri g.

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-657

Tanggal Terbit : 06 November 2019 î.

: 05 November 2025 Tanggal Berakhir

dinyatakan "MEMENUHI" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kavu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok Telp: (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: wsc/a/mutucertification.com / mutu.wsc/a/gmail.com

Depok, 06 November 2019

Bambang Gunardiito

Ka. Op Sbu Sertifikasi Kehutanan

E-mail: webmaster@mutucertification.com Website: www.mutucertification.com



KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI No.: 206.3/SKEP-MUTU/XI/2019

Tentang

PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA KELOMPOK JENEPONTO 5 PROVINSI SULAWESI SELATAN

Menimbang

- 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
- Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari

Mengingat

- 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
- Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
- Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
- ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
- ISO/IEC 17065: 2012 (IAF GD5: 2006) Conformity Assessment Requirements for Bodies Certifiying Products, Processes and Services.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
- Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu".

Memperhatikan

No. SPK: 52/PPHH/SPHH/PPK-3/10/2019 tanggal 03 Oktober 2019 antara KEMENLHK dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

Halaman 1 dari 4



MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : KELOMPOK JENEPONTO 5 dinyatakan "MEMENUHI" penilaian

standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.9 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No :

P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada TPT

KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada KELOMPOK JENEPONTO

5 dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-657, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 06 Nopember 2019 sampai dengan 05 Nopember 2025.

KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (Surveillance) dilakukan sekali dalam dua tahun,

selambat-lambatnya 24 (Dua puluh empat) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan

standar verifikasi yang berlaku.

KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginyestigasi

terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran

Direktur

Dokumen Kontrak).

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit

Khusus dibebankan kepada KELOMPOK JENEPONTO 5.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal: 06 Nopember 2019

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

 Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.

Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.

3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

4. Arsip.

Halaman 2 dari 4

E-mail: webmaster@mutucertification.com Website: www.mutucertification.com

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK:

a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI

b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN

c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953

d. Nomor telepon (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email

/faks. /Email wsc@mutucertification.com
e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.

f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik

Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang

Izin atau pada Hutan Hak.

 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi

Legalitas Kayu (VLK).

g. Tim Audit : Andijarso Soetiman : Lead Auditor

Febi Tresna Yudha : Auditor

h. Tim Pengambil : 1. Ir. Didik Heru Untoro

Keputusan 2. Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee:

a. Nama Pemegang Izin : Kelompok Jeneponto 5

b. Nomor & Tanggal SK : -

c. Alamat Kantor Pusat : Bontoburungeng, Desa Camba-Camba, Kecamatan

Batang, Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan.

d. Alamat Lokasi TPT : 1. UD Jusni:

di Bontoburungeng, Desa Camba-Camba, Kecamatan

Batang, Kabupaten Jeneponto

2. UD Ismail Utama:

di Petang, Desa Arungkeke, Kecamatan Arungkeke,

Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan

3. UD Cahaya Mimbar:

di Petang, Desa Arungkeke, Kecamatan Arungkeke,

Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan

e. Nomor telepon/faks/E-mail : -

f. Pengurus Perusahaan : • Ketua : Baso DG Bella (UD Jusni)



MUTU-4134F 3.1 21/01/2015

• Sekretaris : Yupa (UD Ismail Utama)

Anggota : H. Boko (UD Cahaya Mimbar)

g. Izin Industri

Tempat Penampungan Terdaftar (TPT):

- UD Jusni telah terdaftar sebagai Tempat Penampungan Kayu Terdaftar (TPT) berdasarkan Surat Keterangan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pemerintah Kabupaten Jenepontodengan Nomor: 522/121.404m.XII.2014 tertanggal 30 Desember 2014.
- UD Ismail Utama telah terdaftar sebagai Tempat Penampungan Kayu Terdaftar (TPT) berdasarkan Surat Keterangan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pemerintah Kabupaten Jenepontodengan Nomor: 522/121.404k.XII.2014 tertanggal 30 Desember 2014.
- UD Cahaya Mimbar telah terdaftar sebagai Tempat Penampungan Kayu Terdaftar (TPT) berdasarkan Surat Keterangan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pemerintah Kabupaten Jeneponto dengan Nomor: 522/121.404l.XII.2014 tertanggal 30 Desember 2014.

Izin Tempat Penampungan Terdaftar (TPT) sedang dimohonkan perpanjangan izinnya.

h. Kategori Industri

: Tempat Penampungan Terdaftar

i. Luas dan Kapasitas Izin

UD Jusni : 12 x 21 M2 / 250 M3/Tahun
 UD Ismail Utama : 84 M2 / 500 M3/Tahun
 UD Cahaya Mimbar : 230 M2 / 500 M3/Tahun

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila	-	-
dibutuhkan)		
Pertemuan Pembukaan	21-Okt-19	 a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di Kelompok Jeneponto 5 b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.

Halaman 2 dari 7



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Verifikasi Dokumen dan	22- Okt-19 s.d. 27-Okt-19	 e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan TPT anggota
Observasi Lapangan	Kantor dan TPT anggota Kelompok Jeneponto 5	Kelompok Jeneponto 5
Pertemuan Penutupan	28-Okt-19	 a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen Kelompok Jeneponto 5 f. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	06-Nov-19	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa Kelompok Jeneponto 5 "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.



MUTU-4134F 3.1 21/01/2015

(4) Resume Hasil Penilaian:

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Tidak	
	Diterapkan	
Kriteria 1.1. TPT		
Indikator 1.1.1. TPT memiliki izin yang	; sah	
Verifier	Memenuhi	Tersedia Surat Rekomendasi kepada Dinas Kehutanan
Surat ijin TPT dari Kepala Dinas		Provinsi Sulawesi Selatan tentang Rekomendasi
Provinsi yang membidangi		Perpanjangan izin Tempat Penampungan Terdaftar
Kehutanan.		Kayu Olahan di Kabupaten Jeneponto
Indikator 1.1.2. TPT memiliki dokume	n lingkungan	
Verifier	Memenuhi	Telah tersedia Dokumen SPPL UD Jusni dan Tanda
Dokumen lingkungan hidup (UKL-		Terima Bukti Pengurusan SPPL untuk UD Ismail Utama
UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen		dan UD Cahaya Mimbar sebagai anggota Kelompok
lingkungan hidup lain yang setara)		Jeneponto 5.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk	kayu.	
Indikator 1.2.1. Importir memiliki izin	yang sah	
Verifier	Non Aplicable	Kelompok Jeneponto 5 tidak terdaftar sebagai pemegang
Dokumen pengakuan / pengenal		izin Angka Pengenal Importir (API) dan di dalam realisasi
sebagai importir.		kegiatan usahanya tidak melakukan kegiatan impor kayu.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki siste		ence)
Verifier	Non Aplicable	Kelompok Jeneponto 5 tidak terdaftar sebagai pemegang
Verifier Panduan/pedoman/		izin Angka Pengenal Importir (API) dan di dalam realisasi
prosedur pelaksanaan dan bukti		kegiatan usahanya tidak melakukan kegiatan impor kayu.
pelaksanaan sistem uji tuntas (due		
diligence) importir.		
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk	·	
·	·	an kelompok atau dokumen pembentukan kelompok
Verifier	Memenuhi	Tersedia dokumen pembentukan kelompok atas nama
a. Akte notaris pembentukan		Kelompok Jeneponto 5 yang telah ditandatangani di
kelompok atau dokumen		atas kertas bermaterai dan distempel basah.
pembentukan kelompok.		
b. Internal Audit Anggota	Memenuhi	Tersedia dokumen hasil internal audit anggota
Kelompok		kelompok sebesar 100% anggotanya.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. TPT mampu membuktikan bahwa kayu bulat / kayu olahan yang diterima berasal dari sumber yang		
telah bersertifikat dan / atau memiliki DKP.		



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai kayu bulat / kayu olahan dan / atau bukti pembelian dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Seluruh anggota kelompok Jeneponto 5 tidak melakukan pembelian kayu sehingga tidak terdapat dokumen jual beli.
Verifier d. Bukti Penerimaan kayu bulat / kayu olahan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Seluruh anggota kelompok Jeneponto 5 tidak melakukan pembelian kayu sehingga tidak terdapat dokumen Bukti Penerimaan Kayu
Verifier e. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan /atau DKP dari pemasok.	Non Aplicable	Seluruh anggota kelompok Jeneponto 5 tidak melakukan pembelian kayu sehingga tidak diketahui terdapat pemasok yang ber-SLK/ber-DKP.
Verifier f. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S- LK / S-PHPL / DKP.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap verifier 2.1.1.(e), maka untuk informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum ber-SLK/ber-DKP juga tidak dilakukan.
Verifier g. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	Tersedia dokumen catatan / laporan mutasi kayu di masing-masing anggota Kelompok Jeneponto 5.
Indikator 2.1.2. Importir mampu mer	nbuktikan bahwa kayu	yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	Kelompok Jeneponto 5 tidak melakukan impor barang dalam pemenuhan bahan baku industrinya
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	Kelompok Jeneponto 5 tidak melakukan impor barang dalam pemenuhan bahan baku industrinya
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	Kelompok Jeneponto 5 tidak melakukan impor barang dalam pemenuhan bahan baku industrinya
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Kelompok Jeneponto 5 tidak melakukan impor barang dalam pemenuhan bahan baku industrinya
Verifier e. Deklarasi Impor.	Non Aplicable	Kelompok Jeneponto 5 tidak melakukan impor barang dalam pemenuhan bahan baku industrinya



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi		
	Memenuhi/Tidak Diterapkan			
Verifier	Non Aplicable	Kelompok Jeneponto 5 tidak melakukan impor barang		
f. Bukti pembayaran bea masuk		dalam pemenuhan bahan baku industrinya		
bila terkena bea masuk.				
Verifier	Non Aplicable	Kelompok Jeneponto 5 tidak melakukan impor barang		
g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis		dalam pemenuhan bahan baku industrinya		
kayu yang dibatasi				
perdagangannya.				
Verifier	Non Aplicable	Kelompok Jeneponto 5 tidak melakukan impor barang		
h. Bukti Penggunaan Kayu Impor	·	dalam pemenuhan bahan baku industrinya		
dan produk turunannya.				
Kriteria 3.1. Adanya dokumentasi penjualan dan / atau angkutan kayu bulat / kayu olahan.				
Indikator 3.1.1. TPT memiliki dokume	entasi penjualan dan / a	itau angkutan kayu bulat / kayu olahan		
Verifier	Non Aplicable	Selama periode Juli s/d September 2019 seluruh anggota		
Dokumen yang menunjukan		Kelompok Jeneponto 5 tidak melakukan kegiatan		
penjualan dan / atau angkutan kayu		penjualan/pemindahtanganan		
bulat / kayu olahan	Tondo V. Local			
Kriteria 3.2. Pemenuhan penggunaai	n Tanda v- Legai			
Indikator 3.32.1. Implementasi Tanda	a V-Legal.			
Verifier	Non Aplicable	Kelompok Jeneponto 5 belum mendapatkan Sertifikat		
Tanda V-Legal yang dibubuhkan		VLK, sehingga belum diwajibkan menggunakan		
sesuai ketentuan.		logo/tanda V-Legal.		
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan k	keselamatan dan keseh	atan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur	Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3			
Verifier	Memenuhi	Tersedia Pedoman / Prosedur K3 di masing-masing		
a. Pedoman / prosedur K3.		anggota Kelompok Jeneponto 5 beserta personel yang		
		bertanggung jawab dalam K3.		
Verifier	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 di masing-masing anggota		
b. Implementasi K3.		Kelompok Jeneponto 5 yang masih berfungsi baik		
Verifier	Memenuhi	Tersedianya Catatan Kecelakaan Kerja di masing-masing		
c. Catatan kecelakaan kerja		anggota Kelompok Jeneponto 5.		
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja				
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja				



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi	
	Memenuhi/Tidak		
	Diterapkan		
Verifier	Memenuhi	Tersedianya Kebijakan Perusahaan / TPT yang	
Serikat pekerja atau kebijakan		membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam	
perusahaan (auditee) yang		kegiatan serikat pekerja di masing-masing anggota	
membolehkan untuk membentuk		Kelompok Jeneponto 5.	
atau terlibat dalam kegiatan serikat			
pekerja.			
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak			
pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.			
Verifier	Non Aplicable	Jumlah pekerja pada masing-masing anggota Kelompok	
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP		Jeneponto 5 tidak sampai 10 (sepuluh) orang pekerja.	
yang mengatur hak-hak pekerja.			
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).			
Verifier	Memenuhi	Tersedianya daftar tenaga kerja di masing-masing	
Tidak ada pekerja yang masih di		anggota Kelompok Jeneponto 5 dan tidak terdapat	
bawah umur.		pekerja dibawah umur yang bekerja di masing-masing	
		anggota kelompok.	
Kesimpulan :			

Kesimpulan:

Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Sertifikasi tahun 2019 di Kelompok Jeneponto 5 memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (27 verifier) :

- 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 10 (sepuluh) verifier;
- 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 17 (tujuh belas) verifier;
- 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier.

Dengan demikian Kelompok Jeneponto 5 dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 Jo P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).